



Hak Asasi Terabaikan? DOJ: Respons Polisi D.C. Terhadap Panggilan 911 Berpotensi Melanggar Hak Orang Dengan Gangguan Mental

Description

Pemerintah D.C. diduga melanggar hukum federal terkait disabilitas dengan mengirim polisi untuk menangani panggilan 911 atas keadaan darurat psikiatri, demikian menurut Departemen Kehakiman minggu ini, yang memperkuat gugatan terhadap kota yang diajukan oleh LSM lokal. Asisten Jaksa Agung Kristen Clarke dari Divisi Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman mengatakan, “Tergantung pada tanggapan yang kurang efektif, berpotensi merugikan ... dapat merampas kesempatan orang dengan disabilitas kesehatan mental untuk mendapatkan manfaat yang sama dari layanan publik yang penting.”

Intervensi ini membuat pemerintah federal, yang menangani penuntutan di D.C., terlibat dalam upaya lokal dan nasional yang berkelanjutan untuk menangani keadaan darurat psikiatri dengan lebih efektif, terutama dengan populasi tunawisma yang terus bertambah. Bread for the City, institusi lokal yang menawarkan makanan, perawatan kesehatan, pakaian, dan kebutuhan lainnya kepada orang yang membutuhkan, mengatakan sumber dayanya terkuras oleh seringnya terjadi krisis psikologis karena memanggil 911 dianggap “tidak efektif dan berbahaya.” Perkembangan ini dikarenakan meningkatnya populasi tunawisma di D.C., serta permintaan dukungan krisis kesehatan mental.

Program pilot yang dimulai pada tahun 2021 di D.C. untuk mengalihkan sebagian panggilan kesehatan mental dari polisi ke ahli kesehatan perilaku yang tidak bersenjata. Namun, gugatan yang diajukan tahun lalu mengatakan kurang dari 1 persen panggilan 911 di D.C. untuk keadaan darurat kesehatan mental mendapatkan respons klinis. Sebaliknya, orang dalam distres psikologis seringkali dihadapi oleh petugas polisi bersenjata yang “seringkali memperburuk keadaan darurat dan meningkatkan trauma yang dialami individu dalam krisis dengan, misalnya, secara tidak perlu mengikat tangan orang tersebut atau menggunakan kekerasan berlebihan.”

Menyusul kematian George Floyd pada 2020 dan protes nasional terhadap penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi, banyak kota besar mulai bereksperimen dengan cara untuk mengurangi keterlibatan petugas dalam krisis kesehatan mental. Denver dan Eugene, Ore., sering disebut sebagai model intervensi tanpa senjata. Hakim yang memimpin kasus ini, penunjukan Biden Ana C. Reyes, juga menangani gugatan yang berlangsung lama yang menyatakan bahwa D.C. tidak memberikan

perawatan kesehatan mental kepada anak-anak dari orang tua berpendapatan rendah sebagaimana yang diwajibkan oleh hukum, termasuk dukungan krisis darurat, yang membuat mereka lebih mungkin berakhir di rumah sakit jiwa atau penjara.

Ringkasan

Pemerintah D.C. diduga melanggar hukum federal terkait disabilitas karena mengirim polisi daripada penanggap kesehatan mental terlatih untuk menangani panggilan 911 terkait keadaan darurat psikiatri. Departemen Kehakiman memperkuat tuntutan hukum yang dilayangkan oleh lembaga nirlaba lokal. Bagaimana pendapatmu tentang penanganan krisis kesehatan mental oleh pihak berwenang? Apakah menurutmu langkah yang diambil oleh Pemerintah D.C. sudah cukup efektif? Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan komentar di bawah!

Sumber berita silahkan Cek di sini [Source link](#) . jangan lupa baca berita/artikel terkait melalui link di bawah. dan silahkan cek tools kehamilan terbaru dari homp.my.id yaitu tools [kalkulator kehamilan](#)

default watermark